

PENDIDIKAN DEMOKRASI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (*Studi Pada Pemilihan Ketua OSIS Di SMA Negeri 1 Sinjai*)

Mochamat Nurdin,, Khairul Insan,
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai
E-mail.moch.nurdin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai tingkat pendidikan demokrasi bagi siswa/pelajar Sekolah Menengah Atas dalam memahami Demokrasi melalui Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Sinjai. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana siswa sekolah menengah atas itu dalam memahami demokrasi dan sekaligus dipraktekkan langsung melalui Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Sinjai. Adapun salah satu pemahaman yang mereka dapatkan secara pertama kali melalui Mata Pejaran PKN yang membahas mengenai Demokrasi itu sendiri. Yang ingin diteliti disini apakah sejalan dengan mata pelajaran tersebut dengan pelaksanaan pemilihan ketua osis tersebut secara prakteknya dilihat dari pemahaman demokrasi yang disampaikan oleh Schumpeter mengenai demokrasi procedural.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang dijadikan Informan adalah Pihak-Pihak terkait baik dari Kepala Sekolah, para Kandidat Ketua OSIS serta Siswa secara random. Data hasil temuan dilapangan dianalisis dengan Metode Analisis Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dimana hasil data yang diolah nantinya mampu menghasilkan model pendidikan demokrasi yang ada di Sekolah Menengah Atas itu sejalan dengan demokrasi prosedural yang disampaikan oleh Schumpeter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Politik yang dilakukan melalui dunia pendidikan dan dilaksanakan secara langsung oleh siswa SMA Negeri 1 Sinjai telah memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan mampu mengartikulasikan kepentingannya dengan baik. Melalui pemilihan ketua OSIS tersebut mereka mampu mengaktualisasikan pemahaman mereka mengenai Demokrasi yang berdasar preferensi yang telah mereka dapatkan baik melalui Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun melalui media social dan elektronik yang telah mereka dapatkan.

Luaran dari kegiatan ini adalah: (1) model pendidikan demokrasi yang ada di Sekolah Menengah Atas itu sejalan dengan demokrasi prosedural yang disampaikan oleh Schumpeter, (2) Terbentuknya pemahaman para siswa tentang demokrasi secara langsung lewat pemilihan ketua OSIS tersebut, dan

(3) Mampu diterbitkan melalui Jurnal ilmiah yang ada di STISIP Muhammadiyah Sinjai.

Kata Kunci : Pendidikan, Demokrasi

PENDAHULUAN

Munculnya gelombang reformasi di Indonesia pada akhir 1990-an membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Euforia politik yang kebablasan dan kadang mengatasnamakan demokrasi menggambarkan bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan demokrasi. Demokrasi yang ada sekarang ini seolah cenderung “dipaksakan”. Di beberapa negara yang sudah dan berhasil menerapkan demokrasi, merupakan negara yang di topang oleh citizenship yang memadai.

Di Indonesia ketika nilai-nilai demokrasi belum terinternalisasi kedalam pribadi masing-masing warga negara maka demokrasi hanyalah sebuah “omong kosong”. Kalaupun banyak orang yang mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi pasca runtuhnya rezim orde baru, namun demokrasi yang ada adalah demokrasi semu, munculnya lembaga-lembaga pemerintahan baru, sistem pemilu langsung hingga ke daerah serta bentuk-bentuk lain sebagai simbol telah diterapkannya demokrasi dan tidak di imbangi pembentukan *citizenship*.

Urgensi dunia pendidikan dalam membangun dan membumikan demokrasi, semakin disadari melalui dunia pendidikan. Keterlibatan dunia pendidikan berubah secara aktif dalam melakukan *recovery* dari keterpurukan krisis multi dimensional di Indonesia merupakan keniscayaan, terutama dalam mempersiapkan peserta didiknya yang notabene juga merupakan warganegara yang potensial untuk menghadapi fenomena perubahan sosial.

Bagi Indonesia yang sedang berjalan menuju demokrasi, peran dunia pendidikan semakin penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan civic culture menunjukkan upaya yang sistematis dan integralistik agar generasi muda yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan dapat benar-benar “mengalami proses demokrasi” dengan menjadi tahu dan sadar tentang pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara, dan melestarikan demokrasi. Oleh karenanya untuk menumbuhkan *civic culture* di perlukan upaya perumusan metode dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi di lembaga pendidikan di Indonesia secara sistematis.

Salah satu peluang dalam mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia ialah melalui sekolah menengah atas. Karena pada jenjang inilah, upaya strategis untuk menyemaikan demokrasi bisa terwujud.

Implementasi demokrasi dalam suatu negara sangat memerlukan sikap demokratis dari setiap warga negaranya, apalagi di negara yang plural seperti Indonesia ini, yang Oleh karena itu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sikap demokratis dalam berbagai kehidupan. Untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia saat ini terdapat berbagai tantangan seperti yang telah di paparkan diatas. Tantangan tersebut harus segera diatasi oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu elit politik, akademisi, praktisi, dan siapapun juga yang percaya bahwa demokrasi adalah cara yang terbaik untuk indonesia. Upaya dan strategi untuk mengatasi tantangan itu salah satunya melalui pendidikan khususnya pendidikan demokrasi. Salah satu tempat yang strategis untuk menanamkan sikap demokratis adalah di lingkungan sekolah.

Pendidikan demokrasi harus di mulai dari ranah pendidikan formal mulai sejak dini. Berdiskusi dalam forum OSIS merupakan salah satu bentuk latihan berdemokrasi, dimana siswa yang telah terpilih menjadi anggota OSIS untuk masa jabatan tertentu bertemu untuk memperbincangkan suatu permasalahan dengan siswa lain, dari situlah siswa belajar untuk bersikap menghargai perbedaan pendapat, toleransi terhadap orang lain, musyawarah yang sehat dan jujur, menyampaikan pendapat yang santun, saling mempercayai dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Sederhana memang, tetapi dengan melihat terjadinya kericuhan, lontaran kata-kata kotor wakil rakyat saat bersidang di senayan menjadi sangat sulit menemukan orang yang mempunyai etika dalam bermusyawarah. Wakil rakyat notabene adalah orang-orang yang terdidik, yang pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, namun ironisnya mereka tidak mencerminkan sebagai orang-orang terdidik Fenomena di atas tentu menarik disimak, sebab ada kecenderungan asumsi, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan tidak (kurang) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat. Kalau demikian, apakah selama ini dunia pendidikan memang nihil dari sentuhan pembelajaran demokrasi, Tidak adakah ruang berdemokrasi dalam wacana pendidikan kita sehingga (nyaris) mandul dalam melahirkan demokrat-demokrat ulung, cerdas, dan handal (Mahfud, 2007).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dan sekaligus berfungsi menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada warganegara sejak dini, dengan begitu generasi muda memiliki sikap demokratis, Desain pendidikan

demokrasi tidak semata-mata hanya pada ranah kognitif saja, tetapi haruslah sampai pada tingkat implementasi nilai-nilai demokrasi, sehingga siswa terlatih untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aktifitas hidupnya. salah satu sebab lambatnya proses demokrasi di indonesia adalah karena selama ini pendidikan demokrasi disekolah terlalu mengkognitifkan nilai-nilai demokrasi, sehingga siswa sudah merasa cukup ketika mengetahui apa itu demokrasi dan menjadi tidak berkewajiban bagaimana menerapkan demokrasi dalam hidupnya. Ketidakmampuan guru menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya, dimana guru sebatas menasar pada aspek kognitif siswa saja, hanya akan menghasilkan siswa yang miskin nurani, warganegara yang demokratis merupakan tujuan dari diselenggarakannya pendidikan itu sendiri di indonesia (UU No.20 Th 2003). Secara khusus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester 1 tidak membahas tentang demokrasi secara spesifik namun memberikan gambaran mengenai pembahasan keberagaman lewat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Ini yang perlu di lihat apakah yang ada dalam buku pelajaran itu mampu dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata mengenai pemahaman demokrasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yang berjudul Pendidikan Demokrasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (*Studi pada Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Sinjai*).

Penelitian ini di maksudkan untuk mendiskripsikan bagaimana Pendidikan Demokrasi pada Tingkat Sekolah Menengah Atas dalam Hal ini dilihat dari Proses Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Sinjai.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di lakukan SMA Negeri 1 Sinjai yang terletak di Jalan Persatuan Raya No. 3 Kabupaten Sinjai. Tempat ini merupakan salah satu Sekolah Favorit di Kabupaten Sinjai dan memiliki fasilitas Sekolah yang hampir cukup lengkap. Serta letak sekolah yang strategis yang berada di pinggir jalan protokol sehingga akses terhadap informasi bagi siswa sekolah tersebut sangat mudah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengembalian data dengan tujuan dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang di teliti. Peneliti langsung melihat

proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian, hingga melihat proses pemilihan Ketua OSIS jika dimungkinkan. Mengingat pengamatan langsung terhadap proses Pemilihan Langsung tidak dapat saya lakukan, maka pengamatan yang saya lakukan adalah menyangkut bagaimana proses para subyek melakukan proses pemahaman demokrasi dengan aktifitas keseharian mereka.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti atau petugas peneliti, melakukan “kontak langsung” dengan subjek informan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan secara lisan dan jawaban informan di kemukakan secara lisan pula. Peneliti akan melakukan metode wawancara “*Indepth Interview*” dengan harapan mendapat data yang lebih mendalam. Informan penelitian ini dirinci sebagaimana berikut ini :Siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Sinjai yang telah melaksanakan hak pilih, Calon Peserta Kompetisi Pemilihan Ketua OSIS, Guru Pengajar PKN, Kepala Sekolah, Guru Pembina OSIS.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu alat atau instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti agar supaya data dari sesuatu sumber / dokumen biasa di kumpulkan dengan cara terseleksi sesuai dengan keperluan peneliti bersangkutan.

Metode dokumen yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengambil data-data, gambar-gambar dan laporan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Demokrasi

Berdasarkan latar belakang di atas, keberadaan pendidikan sangat penting untuk memulai langkah awal dalam kesadaran berdemokrasi. Pendidikan itu bisa di dapat dari pendidikan formal.

Sejumlah cendekiawan mengelaborasi pandangan mengenai budaya penanaman demokrasi dalam pendidikan. Dalam gagasan pengembangan pendidikan hal ini disoroti Paulo Freire yang mengemukakan pembebasan penuh dalam pendidikan institusional. Tatanan nilai positif Freire diniatkan pada beberapa proses dalam pendidikan, yaitu apakah institusi pendidikan berniat mencetak manusia mekanistik, atau berusaha untuk lebih menghasilkan manusia yang berbudaya yang lebih diarahkan pada peraih kebebasan dan humanisasi. pendidikan dipahami sebagai aksi kultural untuk pembebasan. Ia harus diperluas perannya dalam

menciptakan kehidupan publik yang lebih demokratis. Untuk itu, dalam pandangan Freire, harus ada semacam kontekstualisasi pembelajaran di kelas. Teks yang diajarkan di kelas harus dikaitkan kehidupan nyata. Dengan kata lain, harus ada dialektika antara teks dan konteks, teks dan realitas.

Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan di Indonesia pun telah berpendapat dalam kerangka pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan. Yang menekankan bahwa titik-berat proses belajar-mengajar terletak pada murid. Pengajar berperan sebagai fasilitator atau instruktur yang membantu murid mengkonstruksi koseptualisasi dan solusi dari masalah yang dihadapi. Mereka bependapat bahwa pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat pada murid (*student center learning*). Konstruktivisme yang menjadi ide dasar Ki Hajar Dewantara, sudah besar pengaruhnya sejak periode 1930-an dan 1940-an di Amerika, juga di Eropa. Dasar pertama yang dari pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan adalah 'teori konvergensi' yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia merupakan hasil interaksi dari faktor bawaan (*nature*) dan faktor pengasuhan (*nurture*). Dalam tulisannya berjudul "Tentang dasar dan ajar" di Pusara Nopember 1940-Jilid 9 no. 9/11, Ki Hadjar menunjukkan keberpihakannya kepada teori konvergensi. Menurutnya, baik 'dasar' (faktor bawaan) maupun 'ajar' (pendidikan) berperan dalam pembentukan watak seseorang yang memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang dapat dijadikan media pembelajaran, mencakup pembelajaran tentang konsekuensi logis dari tindakan sesuai dengan hukum sebab-akibat dan kesadaran tentang pentingnya belajar bagi kehidupan siswa dalam keseharian mereka. Ki Hadjar menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, serta mampu memberi kontribusi kepada masyarakatnya. Menjadi manusia merdeka berarti (a) tidak hidup terperintah; (b) berdiri tegak karena kekuatan sendiri; dan (c) cakap mengatur hidupnya dengan tertib.

Dengan begitu berarti bahwa dalam menanamkan Pendidikan Demokrasi pada siswa haruslah dapat memahami dan mampu memberikan apa yang dia dapatkan melalui dunia luar, tidak hanya sebatas apa yang di ajarkan didalam kurikulum dan bahan ajar yang bersifat baku. Namun, yang harus dibangun oleh guru mengenai bagaimana ikut berempati terhadap permasalahan yang ada dilingkungan sekitar mereka. Karena demokrasi tidak serta merta langsung dipelajari dan seketika itu pula dapat dipahami dan diterapkan, oleh sebab itu berbagai macam artian demokrasi dalam perspektif yang berbeda-beda.

1. Demokrasi Prosedural

Sedangkan dalam tataran demokrasi, **Schumpeter** mengemukakan gagasan teori Demokrasi prosedural, bahwa demokrasi harus diatur dalam landasan-landasan yang bersifat prosedural yang memenuhi tiga prasyarat pokok, diantaranya:

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu dan atau kelompok (terutama parpol) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan.
2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilu secara reguler dan adil, tak satupun kelompok dikecualikan.
3. Kebebasan sipil dan politik (berbicara, pers, berserikat) yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Gagasan ini diperkuat oleh Robert Dahl, dengan mengajukan prasyarat terbentuknya sistem demokrasi sebagai berikut:

1. Partisipasi efektif
Sebelum kebijakan digunakan oleh negara atau asosiasi, anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan partisipasi aktif agar pandangan mereka diketahui oleh anggota lain sebagaimana seharusnya kebijakan itu dijalankan.
2. Persamaan suara
Jika sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif, dimana seluruh suara dihitung semua.
3. Pemahaman yang jelas
Dalam batas waktu yang rasional, anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternative yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi.
4. Pengawasan agenda
Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan permasalahan apa yang dibahas dalam agenda.
5. Pencakupan masyarakat hukum adalah orang dewasa

Setiap orang dewasa yang menjadi penduduk seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria diatas.

Pasca kolonialisme Hindia Belanda, Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara demokrasi dengan kemerdekaannya, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi. Memang demokrasi bukanlah sesuatu yang final, masih dalam proses pencarian seperti apa sebenarnya wujud dari demokrasi itu sendiri, lantas apakah benar bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. seabsurd-absurdnya demokrasi, ia punya mekanisme untuk memperbaiki diri, karena dunia dimana ia hidup tidak sempurna, perjalanan menuju sempurna yang tak pernah selesai itu, membuat orang tak jemu mencari demokrasi (menatap demokrasi dari jendela johari). Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada tahun 1999 merupakan langkah awal bagi pencarian demokrasi di Indonesia, sejak itu pula dalam rentang waktu lima tahun pergantian kepemimpinan nasional berlangsung sebanyak tiga kali dan bisa dikatakan mulus.

Suksesnya penyelenggaraan pemilu tanpa ada konflik yang berdarah bisa dikatakan menjadi bukti berjalannya demokrasi di Indonesia. Namun tentunya tidak semua orang lantas bersepakat bahwa berjalannya demokrasi di Indonesia hanya diukur dari suksesnya penyelenggaraan pemilu saja, tidak sesederhana itu ketika sebuah Negara bisa dikatakan sebagai Negara demokratis.

Betham secara meyakinkan berargumentasi bahwa pengertian yang diterima umum tentang demokrasi adalah pengendalian masyarakat atas urusan publik berlandaskan kesetaraan politik (Demos,15).

Dari pengertian demokrasi yang dipaparkan oleh betham diatas, demokrasi menyaratkan adanya kesetaraan warganegara, tegaknya hukum, hak-hak politik, keterwakilan partisipasi masyarakat. Prasyarat inilah yang bisa untuk melihat apakah demokrasi benar-benar sudah berjalan di Indonesia.

Terjadinya mafia peradilan, konflik antar suku dan umat beragama menjadi gambaran lemahnya kesadaran kemajemukan, yang mengakibatkan terjadinya fenomena disintegrasi, kerusuhan hasil pemilu kade di berbagai daerah, money politik, korupsi di segala bidang, praktik-praktik tujuan yang menghalalkan segala cara, kurangnya permusyawaratan yang jujur dan sehat (ketidakmampuan untuk bermusyawarah), terjadinya krisis ekonomi dan tidak ada kepercayaan antarwarga masyarakat, hal-hal demikian ini setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa kita masih belum memiliki budaya demokrasi seperti yang diharapkan.

Hal ini diperkuat hasil survey dari *National Survey of Voter Education*" (Asia Foundation, 1998) menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel nasional mengindikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi (dikutip dari Mulyadi, harian Swara Kaltim bagian DIKNA, dimuat berseri pada 9, 10, 11, Oktober 2003). inilah potret Indonesia hingga saat ini dan menjadi tantangan bagi siapapun yang pro demokrasi dan mempunyai mimpi merubah Indonesia menjadi Negara yang benar-benar demokratis.

Dengan melihat prasyarat demokrasi dari betham, dan juga melihat kondisi Indonesia saat ini sepertinya Indonesia belumlah bisa dikatakan sebagai Negara demokrasi, walaupun bisa Indonesia sekarang barulah sejauh pada tahap Negara yang mencoba mengimplementasikan demokrasi.

Hingga 12 tahun pasca runtuhnya rezim orde baru, sepertinya proses demokratisasi di Indonesia berjalan di tempat atau bahkan bisa dikatakan proses demokratisasi di Indonesia mengalami kemandegan. apa yang menjadikan lambatnya demokrasi di terapkan di indonesia, akademisi, peneliti, hingga aktifis yang pro demokrasi tidak henti-hentinya memperbincangkan, mengkaji hingga melakukan riset untuk melakukan perbaikan demi berjalanya demokrasi di Indonesia. mereka yang pro demokrasi Hingga sekarang pun masih mengalami kebuntuan dalam memberikan formula yang mujarab untuk pengimpletasian demokrasi di Indonesia.

Implementasi demokrasi dalam suatu negara sangat memerlukan sikap demokratis dari setiap warga negaranya, apalagi di negara yang plural seperti indonesia ini, yang Oleh karena itu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sikap demokratis dalam berbagai kehidupan. Untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia saat ini terdapat berbagai tantangan seperti yang telah di paparkan diatas. Tantangan tersebut harus segera diatasi oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu elit politik, akademisi, praktisi, dan siapapun juga yang percaya bahwa demokrasi adalah cara yang terbaik untuk indonesia.

3. Demokrasi di Sekolah

Upaya dan strategi untuk mengatasi tantangan itu salah satunya melalui pendidikan khususnya pendidikan demokrasi. Salah satu tempat yang strategis untuk menanamkan sikap demokratis adalah di lingkungan sekolah. Pendidikan demokrasi harus di mulai dari ranah pendidikan formal mulai sejak dini. Berdiskusi dalam forum OSIS merupakan salah satu bentuk latihan berdemokrasi, dimana siswa yang telah terpilih menjadi anggota OSIS untuk masa jabatan tertentu bertemu untuk memperbincangkan suatu permasalahan dengan siswa lain, dari situlah siswa belajar

untuk bersikap menghargai perbedaan pendapat, toleransi terhadap orang lain, musyawarah yang sehat dan jujur, menyampaikan pendapat yang santun, saling mempercayai dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Sederhana memang, tetapi dengan melihat terjadinya kericuhan, lontaran kata-kata kotor wakil rakyat saat bersidang di senayan menjadi sangat sulit menemukan orang yang mempunyai etika dalam bermusyawarah. Wakil rakyat notabene adalah orang-orang yang terdidik, yang pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, namun ironisnya mereka tidak mencerminkan sebagai orang-orang terdidik Fenomena di atas tentu menarik disimak, sebab ada kecenderungan asumsi, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan tidak (kurang) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat. Kalau demikian. apakah selama ini dunia pendidikan memang nihil dari sentuhan pembelajaran demokrasi, Tidak adakah ruang berdemokrasi dalam wacana pendidikan kita sehingga (nyaris) mandul dalam melahirkan demokrat-demokrat ulung, cerdas, dan andal.(Chairul Mahfud, pendidikan Multikultural,pustaka pelajar,2007).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dan sekaligus berfungsi menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada warganegara sejak dini, dengan begitu generasi muda memiliki sikap demokratis, Desain pendidikan demokrasi tidak semata-mata hanya pada ranah kognitif saja, tetapi haruslah sampai pada tingkat implementasi nilai-nilai demokrasi, sehingga siswa terlatih untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aktifitas hidupnya. salah satu sebab lambatnya proses demokrasi di indonesia adalah karena selama ini pendidikan demokrasi disekolah terlalu mengkognitifkan nilai-nilai demokrasi , sehingga siswa sudah merasa cukup ketika mengetahui apa itu demokrasi dan menjadi tidak berkewajiban bagaimana menerapkan demokrasi dalam hidupnya. Ketidakmampuan guru menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya, dimana guru sebatas menysar pada aspek kognitif siswa saja, hanya akan menghasilkan siswa yang miskin nurani, warganegara yang demokratis merupakan tujuan dari diselenggarakanya pendidikan itu sendiri di indonesia (UU NO.20 Th 2003).

Secara khusus mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI semester 1 mengajarkan bab tentang demokrasi. Seperti apa bahan yang di ajarkan, metode apa yang di pakai guru dalam mengajarkan demokrasi, bagaimana siswa memahami demokrasi dan mengimplementasikan demokrasi khususnya dalam berorganisasi di sekolah, hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini.

Dari beberapa sistem yang dikemukakan, pengenalan pendidikan berdemokrasi ini, sebagai salah satu langkah awal dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Karena jenjang ini adalah langkah strategis untuk menyemaikan benih demokrasi, dimana siswa Sekolah Menengah Atas bisa memahami lebih mendalam sistem electoral yang merupakan dasar dari sistem yang harus diketahui tentang demokrasi. Dengan pendidikan yang bebas menunjukkan pola penerapan demokrasi melalui sistem prosedural.

Peneliti sengaja menggunakan perspektif Schumpeter didalam memahami pola pemahaman siswa dalam memahami demokrasi yang langsung mampu diinternalisasikan kepada diri mereka secara pribadi serta mampu dipraktekkan dalam proses pemilihan OSIS. Peneliti memosisikan bahwa sekolah sebagai miniature Negara dimana keberagaman dan kebersamaan dalam beraktifitas sehingga sangat relevan untuk melihatnya dengan perspektif Schumpeter tersebut.

PEMBAHASAN

Profil SMA Negeri 1 Sinjai

SMA Negeri 1 Sinjai yang beralamat di Jalan Persatuan Raya Nomor 13 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan kodepos 92612 memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 40304505 dan berstatus sebagai Sekolah Negeri. Memiliki izin operasional berdasarkan SK nomor 79/SK/B.III pada tanggal 01 Agustus 1964 dan telah menamatkan banyak siswa sekolah sampai tahun 2019 ini. Luas tanah yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Sinjai sebanyak 6352 m2 yang terdiri bangunan dan sarana olah raga lainnya.

Berdasarkan sejarah, bahwa cikal bakal berdirinya SMA Negeri 1 Sinjai Utara berawal dengan dibentuknya sebuah yayasan yang didirikan atas prakarsa Pemda Sinjai pada bulan agustus 1961 yaitu YAPENDAS (Yayasan Pendidikan Sinjai). Pada awal berdirinya, YAPENDAS yang tetap eksis mengelola pendidikan hanya memiliki 50 orang termasuk beberapa pegawai. Sehingga pada saat pembukaan SMA Yapendas ini memiliki jurusan C, saat itu sebuah sekolah diharuskan untuk memilih jurusan sesuai dengan potensinya.

Dalam aktivitasnya, sekolah YAPENDAS untuk sementara menumpang pada gedung SMP Negeri 1 Sinjai pada sore hari, karena pada saat itu belum memiliki gedung sendiri. Selanjutnya pada tahun 1962, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke gedung Muhammadiyah di Jl. Sultan Hasanuddin dan diubah statusnya menjadi

Sekolah kelas jauh atau filial dari SMA Negeri 160 Bantaeng. Selanjutnya dipindahkan lagi ke gedung tua peninggalan Belanda. Sebagai sekolah filial maka sekolah induk mengirimkan 2 orang guru untuk mengelolanya yaitu Dr. Merapi Ahmad dan Johannis Tulili.

Seiring dengan perkembangan zaman, eksistensi SMA Filial ini terus memperlihatkan kemajuan dan peningkatan yang cukup menggembirakan, sehingga Pemda Sinjai memberikan bantuan alat-alat pendidikan termasuk alat-alat mobiler. Setelah melalui proses panjang, maka akhirnya status Filial Bantaeng diubah menjadi sekolah berdiri sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keputusan Mendikbud RI No.79/SK/B III tertanggal 1 Agustus 1964 dengan nama SMA Negeri 277 Sinjai. Adapun yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah pertama waktu itu adalah Bapak Sariman Syarif BA dan gedung sekolah ditetapkan menempati gedung peninggalan Belanda, hingga kini.

Dalam rangka penyesuaian nomor sekolah serta menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan maka nomor register sekolah-sekolah yang ada di sinjai serta sekolah-sekolah lain di Indonesia diubah berdasarkan aturan Menteri Pendidikan. Dalam menyesuaikan perubahan nomor register tersebut maka nama SMA Negeri 277 Sinjai diubah menjadi SMA Negeri 1 Sinjai Utara berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan No.0351/0/1997 tanggal 7 Maret 1997.

Adapun yang pernah menduduki jabatan-jabatan sebagai Kepala Sekolah adalah:

1. Sariman Syarif (1 Agustus 1964 s.d 31 Agustus 1969)
2. M.Syarifin Baso (1 September 1969 s.d 15 Juni 1984)
3. Drs. Sappe Enggong (16 Juni 1984 s.d 8 Maret 1991)
4. Amien Panna,SH (20 April 1991 s.d 30 Juni 1998)
5. Arifuddin Pamin, B.A (1 Juli 1998 s.d 13 Desember 1999)
6. Drs. Ahmad Manjade (14 Desember 1999 s.d 7 Maret 2002)
7. Drs. Muhammad Sultan (8 Maret 2002 s.d 13 Desember 2010)
8. Drs. Juanda (13 Desember 2010 s.d 30 Mei 2014)
9. Drs. Muhammad Ali Musa, M.M (30 Mei 2014 s.d 2017)
10. Drs. Arifuddin P. (2017 s.d. sekarang)

Demokrasi di sekolah di ajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan di jenjang sekolah menengah atas kelas XI semester 1 pada modul pembelajaran PKn

untuk SMA oleh MGMP Kabupaten Sinjai, pada jenjang ini siswa diajak untuk menganalisis budaya demokrasi di Indonesia. Mendiskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi, mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani, menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi, menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, merupakan yang menjadi kompetensi dasar pendidikan demokrasi di sekolah.

Bahan ajar demokrasi di sekolah

Pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.

Pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh dan untuk rakyat menjadi prinsip dasar pengertian demokrasi. Hal ini dengan di cirikan bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan. Budaya demokrasi merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa atau Negara diyakini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang demokratis.

Prinsip Demokrasi yang berlaku secara universal mengadopsi dari internasional *commission of jurist* dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1965, bahwa syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah "rule of law" mencakup perlindungan konstitusi, badan kehakiman yang independent, pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan.

Satu Negara dengan Negara lainnya kadang berbeda dalam menerapkan demokrasi, sangat dipengaruhi dan di sesuaikan dengan faktor sejarah, kondisi sosial kultural, perkembangan ekonomi serta aspek-aspek lain yang berbeda di setiap Negara, namun walaupun berbeda harus memenuhi prinsip dasar demokrasi universal.

A. Pengertian dan Ciri-ciri masyarakat madani

Masyarakat madani disamakan dengan civil society, dimana masyarakat madani atau civil society adalah perwujudan masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, rasional, berkeadilan sosial dan sejahtera, masyarakat madani juga mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Masyarakat madani dicirikan Lahir secara mandiri dibentuk oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan Negara, Keanggotaan bersifat sukarela atas kesadaran masing-

masing anggota, Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya) tidak bergantung bantuan pemerintah.

(Waren dan Lyon, 1983 dalam modul pembelajaran MGMP untuk SMA, 2006).

B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia di bagi bagi dalam beberapa kurun waktu yaitu awal kemerdekaan, masa orde lama (1945-1965), orde baru (1965-1998) dan reformasi (1998-sekarang). ketiga kurun waktu demokrasi Indonesia di bingkai dengan demokrasi pancasila, yaitu demokrasi yang didasari pada nilai-nilai pancasila yang didasari prinsip musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Ketiga masa kurun waktu tadi tidak dijelaskan bagaimana perkembangan demokrasi itu berlangsung, disini malah menjelaskan keadaan sistem ketatanegaraan Indonesia ,pemberlakuan konstitusi di Indonesia, system pemerintahan Indonesia, dan amandemen UUD 1945 pada periode reformasi, hal ini justru tidak berbeda dengan pelajaran sejarah.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Di Lingkungan keluarga :

Masalah-masalah keluarga hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Kepala keluarga selalu menyerap aspirasi dan pendapat dari anggota keluarga untuk mencapai kata mufakat. Manfaat musyawarah di lingkungan keluarga adalah :

1. Seluruh anggota keluarga merasa berarti atau berperanan.
2. Anggota keluarga ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.
3. Tidak ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan
4. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan semakin kokoh.

Di lingkungan sekolah :

1. Menyusun tata tertib bersama
2. Menyusun kelompok piket kelas
3. Memilih ketua OSIS, ketua kelas

Di Lingkungan Masyarakat :

1. Pemilihan ketua RT

2. Musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama, seperti program pembangunan masyarakat dan lingkungan.

Di Lingkungan Negara :

1. Terlibat dalam pemilihan umum

2. Melalui wakil kita terlibat dalam penyusunan Undang-undang

3. Melakukan pengawasan baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan, terutama untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penilaian. Dimana tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dan berhasil tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan oleh para pengajar dan siswa. Terutama untuk perubahan-perubahan perilaku siswa yang diharapkan melalui proses belajar. Secara umum, dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat 3 ranah yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa sebagai hasil belajar. Ketiga ranah tersebut adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penilaian ketiga ranah tersebut, aspek yang terdapat dalam masing-masing ranah penilaian tentu berbeda-beda.

Sebagaimana juga dikatakan Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, Sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik, dapat diukur dengan menggunakan ketiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Komponen kognitif misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai perkembangan sistem politik, para elite birokrasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik. Komponen afektif berbicara mengenai aspek perasaan seorang warga negara yang khas terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Sedangkan, dalam komponen evaluatif, orientasi warga negara ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dimilikinya.

Dalam pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan bab tentang demokrasi, maka pemahaman siswa terhadap demokrasi bisa dilihat dari ketiga aspek tersebut yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam aspek kognitif misalnya siswa diharapkan mengetahui dan memahami pengertian dari demokrasi, macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal,

pelaksanaan demokrasi di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi pancasila, dll. Pada aspek kognitif siswa hanya cukup untuk mengetahuinya segala sesuatu yang berhubungan dengan demokrasi. Setelah siswa mengetahui segala hal tentang demokrasi, maka apa yang telah ia ketahui terdapat kedalam diri siswa, dan manakala dalam kehidupan keseharian yang ia temui tentang praktek demokrasi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, ia sudah memiliki sikap terhadap hal tersebut, apakah akan menerima atau menolak. Misalnya dalam mempelajari pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Masa Orde Lama, Masa Orde Baru dan reformasi, siswa bisa mengidentifikasi praktek-praktek pemerintahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Lebih jauh aspek afektif bisa di lihat dari sikap kerjasama, menghargai perbedaan, sportif dan tanggungjawab. Pada ranah atau aspek psikomotorik kemampuan siswa dalam memahami demokrasi dapat diukur dan dilihat dari bagaimana ia mempraktekan apa yang telah ia ketahui tentang demokrasi, misalnya siswa dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, siswa mampu berperilaku yang mendukung terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi¹, seperti musyawarah untuk mufakat, pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, berperan serta memberikan suara pada pemilu, megkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, ikut menduduki jabatan publik,dll.

Kesuksesan pembelajaran demokrasi harus menysasar pada ketiga aspek tersebut, ketiganya saling terkait dan berhubungan, untuk itu berhasil atau tidaknya pembelajaran demokrasi di sekolah harus di ukur dan dievaluasi dari ketiga aspek tersebut yaitu aspek kognitif, afektif, dan Psikomotorik.

Electoral sebagai Wujud Pemahaman Demokrasi

Penelitian kami fokus pada batasan meneliti outcome dari nilai internalisasi demokrasi pada pelajar SMAN 1Kabupaten Sinjai, yang meliputi perilaku, pemahaman, dan perubahan sikap siswa dalam berdemokrasi. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada beberapa siswa-siswi SMAN 1 Sinjai, yang meliputi panitia pemilu OSIS, Pengurus OSIS, dan siswa-siswi dari kelas X, XI, dan XII yang tidak terlibat dalam kepengurusan OSIS. kami memperoleh data bagaimana mereka melakukan praktik demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem electoral.

¹ Modul Pkn SMA-SMK-MAK

Menurut MPK sebagai panitia pelaksana pemilu OSIS yang dilaksanakan pada bulan September 2018, sistematika penyaringan dimulai dari open recruitment dengan meyosialisasikan pendaftaran pemilihan pengurus OSIS, kemudian membuka pendaftaran yang ditujukan bagi semua siswa-siswi yang diberi kebebasan untuk memilih posisi jabatan yang mereka inginkan. Setelah itu diadakan tes tertulis dan yang lolos akan mengikuti interview tahap 1 yaitu oleh pengurus OSIS dan alumni, jika lolos lagi akan melalui interview tahap 2 oleh Guru. Setelah terpilih 5 besar, kandidat ketua OSIS harus melaksanakan orasi didepan warga sekolah, untuk kemudian dilaksanakan pemilu. Ketua OSIS terpilih mempunyai hak prerogatif untuk memilih pengurus yang lain, dengan tetap memprioritaskan 4 kandidat yang lain dan mempertimbangkan kapabilitas masing-masing calon pengurus.

Alasan mereka menggunakan sistem pemilihan dengan model tersebut adalah mengikuti pola yang telah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Kami mencermati sistem elektoral yang dilaksanakan sudah sangat terbuka dan lekat dengan sistem demokrasi. Namun, sistem pendaftaran yang dibuka bagi seluruh siswa-siswi dan memberi kebebasan mereka untuk memilih posisi sesuai keinginannya, cara seperti ini pada akhirnya terlihat siswa-siswi cenderung tidak ingin memilih jabatan sebagai ketua OSIS dan mereka lebih tertarik untuk duduk di seksi bidang untuk memenuhi kebutuhan pengalaman organisasi. Tapi yang menarik, di SMAN 1 Sinjai ini, Guru dan karyawan Sekolah juga dilibatkan dalam pemilu. Ada 10 seksi bidang di OSIS, seksi Keagamaan, seksi Tanti Upacara, seksi Olahraga, seksi Tim Olimpiade, seksi Organisasi & Humas, seksi Rumah Tangga & Prasarana, seksi Kesehatan, seksi Kesenian, seksi TIK (Teknologi, Informasi & Komunikasi), dan seksi Komunikasi (koordinator bahasa).

Pemilihan tim MPK yang berjumlah 3 orang, pada awal rekrutmen melalui proses yang sama dengan rekrutmen pada pemilihan pengurus OSIS. Namun, pada tahap interview, kandidat hanya diinterview oleh guru dan hanya guru yang berhak memutuskan untuk memilih tim MPK.

Dari hasil wawancara kami dengan siswa-siswi kelas X, XI, dan XII yang tidak terlibat di kepengurusan OSIS tentang pengamalan nilai-nilai pembelajaran demokrasi yang telah mereka pelajari, pelajaran teori demokrasi yang telah mereka dapat sangat berpengaruh dengan sikap mereka ketika menjalankan praktik-praktik berdemokrasi, mereka semua sangat memahami demokrasi dalam sistem elektoral. Bagi kelas X yang belum terlalu mendalami teori demokrasi, sejauh penilaian mereka pelaksanaan

pemilu OSIS sudah sangat demokratis, karena pemilu OSIS dilaksanakan secara terbuka mulai dari sistem open rekrutmen hingga sistem pemilihan.

Tapi bagi kelas XI dan XII yang sudah belajar teori demokrasi secara terperinci, bekal yang mereka dapatkan didalam kelas, dirasa sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi dalam keseharian mereka dilihat dari kesadaran penggunaan hak memilih dan dipilih secara terbuka, adanya fungsi legislasi yang dijalankan MPK dan merupakan pembagian kekuasaan yang sejajar. Tapi dengan jujur mereka mengakui tidak terlalu tertarik mempelajari pelajaran PKn termasuk demokrasi, karena mereka lebih memilih untuk mempelajari sendiri cukup dengan sekali baca buku dan mengikuti perkembangan demokrasi dari berita di media.

Ini menunjukkan kepada kita bahwa lebih banyak dari mereka bahwa pemahaman mereka lebih banyak didapatkan dari media dan sesuatu yang mereka lihat, dalam hal ini apa yang dipraktekkan oleh Politisi melalui pemilihan Anggota DPR dan DPRD. Terkadang pemahaman yang bersifat pragmatis dari para politisi ini mempengaruhi pemahaman mereka tentang arti demokrasi. Pemilihan Ketua OSIS sebagai elemen untuk mengukur tingkat sejauhmana demokrasi yang terbangun dalam cara pandang siswa SMU belum juga mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam tingkat partisipasi

Dari proses pemahaman yang mereka dapat melalui pendidikan formal yang tertera dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang arti demokrasi masih belum menunjukkan hal yang memuaskan. Pada prinsipnya apa yang siswa pahami dalam berdemokrasi dengan mendapatkan pendidikan demokrasi dalam bentuk riilnya adalah dengan mengikuti proses election para pengurus OSIS sebagaimana yang dikemukakan oleh Schumpeter dan diperkuat dengan pendapatnya Robert Dahl tentang adanya partisipasi dalam proses aktualisasi pemahaman demokrasi. Aspek kognitif dari pembelajaran PPKn ini belum mampu memberikan inspirasi dalam proses pemahaman arti demokrasi, sedangkan aspek afektifnya mereka mampu mengidentifikasi bagaimana proses demokrasi itu berjalan, dan aspek evaluatifnya bagaimana mereka mampu mengimplementasikan dan mengoreksi artian demokrasi yang mereka pahami dalam praktek dilingkungan sekitar mereka.

Kontribusi media dalam proses pendidikan politik bagi bangsa sangatlah besar, terutama bagi siswa SMU yang memang sementara lagi belajar apa yang dimaksud dengan demokrasi yang senantiasa mereka dengar terus menerus. Politik

media sangat berpengaruh dalam membangun kerangka pemikiran siswa tentang arti demokrasi, karena dari siswa yang kami interview memberikan keterangan bahwa pemahaman demokrasi mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pemberitaan dan tayangan media, sehingga konstruksi berpikir mereka mengenai demokrasi sebatas apa yang ditampilkan oleh para politisi dan pengamat memberikan argumentasi dalam setiap tayangan dan artikel yang mereka sampaikan.

Jadi pelaksanaan Pemilihan OSIS merupakan salah satu bentuk instrumen untuk mengetahui bagaimana siswa memahami demokrasi secara procedural ternyata tidak memberikan kontribusi pemahaman secara hakiki, melainkan hanya partisipasi yang menunjukkan keharusan/kewajiban mereka, bukan partisipasi yang menunjukkan hak mereka sebagai warga negara. Jadi apa yang disampaikan oleh Schumpeter tentang demokrasi procedural tersebut tidak dapat dibuktikan dalam penelitian kami ini, yang paling penting dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi yaitu melalui proses sosialisasi politik, dengan tiga aspek pendidikan yaitu; kognitif, afektif dan evaluative sebagaimana yang disampaikan oleh Gabriel Almond. Dimana dalam mengkonstruksi pemikiran daripada siswa haruslah dapat melibatkan *environment* (lingkungan) dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang demokrasi serta membebaskan mereka untuk mencari tahu pemahaman yang lain selain apa yang berdasar pada kurikulum proses pendidikan formal sebagaimana yang disampaikan oleh Paulo Friere.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendidikan demokrasi tidak hanya didapat dari sekolah semata, melainkan dapat dari berbagai media yang ada terutama media elektronik sangat berpengaruh dalam pemahaman siswa tentang arti demokrasi. Jadi untuk mengukur pemahaman siswa dengan berjalanya pelaksanaan pemilihan OSIS di SMA Negeri 1Sinjai, dengan partisipasi dari semua elemen siswa baik itu siswa sebagai panitia pemilihan, siswa dalam posisi sebagai pemilih dan siswa yang berposisi untuk dipilih, secara umum mereka bisa dikatakan paham dengan demokrasi dalam tataran penerapannya dalam sebuah pemilu. Ini bisa dilihat dari semangat panitia penyelenggara dalam merumuskan sebuah mekanisme atau aturan main yang se-fair mungkin yang nantinya bisa diterima semua pihak, antusiasme siswa yang tinggi untuk menduduki jabatan sebagai pengurus OSIS, dalam Peran pendidikan demokrasi lewat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dengan segala kelemahannya tidak dipugkiri mempunyai andil yang besar

dalam memperkenalkan demokrasi kepada siswa, namun pengetahuan mereka tentang demokrasi tidak semata-mata mereka dapat dari bangku sekolah saja, keluarga, lingkungan, dan media (massa khususnya televisi) juga memberikan pengaruh tentang pemahaman demokrasi bagi mereka. Serta pelaksanaan Pemilihan OSIS merupakan salah satu bentuk instrumen untuk mengetahui bagaimana siswa memahami demokrasi secara procedural ternyata tidak memberikan kontribusi pemahaman secara hakiki, melainkan hanya partisipasi yang menunjukkan keharusan/kewajiban mereka, bukan partisipasi yang menunjukkan hak mereka sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Muhammad, Alu Abd. Latif, (*Departemen Agama Saudi Arabia 1422 H*)
- Abu Ahmad, Nurbaeti, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1991)
- Bachtiar, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Chairul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Dahlan Al-Bahri, *Kamus Modern Bahasa Indonesi*, (Yogyakarta: Arkola), 1994
- Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi*, Demos, Yogyakarta, 1998
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik I Statistik Deskriptif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 17
- Rahman Getteng, *Pendidikan Islam Dalam Pembangunan Moral, Remaja Wanita Pembangunan* (Ujung Pandang Yayasan Al-Ahkam 1977), h. 11
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standa Proses Pendidikan*, (Jakarta, Kencana Prinata Media Group, 2002)
- Senapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sugiono, *Statistik, untuk Penelitian*, (Jakarta, Alfabeta, 2009)
- Undang-Undang RI, No. 12 tahun 2012, *Pendidikan Tinggi*, (Bandung: Citra Umbara, 2012)